1

WAWASAN

TRIDHARMA

MAJALAH ILMIAH KOPERTIS WILAYAH IV

NOMOR 4 TAHUN XXIII NOVEMBER 2010

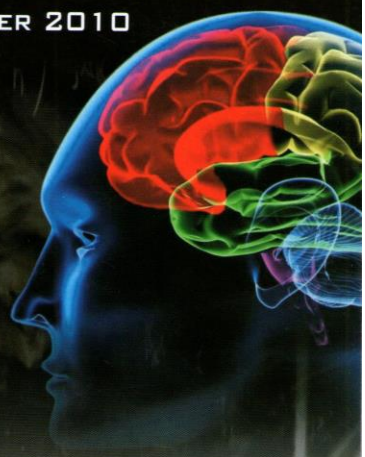

Karakteristik Ilmu Matematika Dapat Mengkontruksi Kecerdasan Emosional dan Sikap Kepribadian Manusia
Oleh: Ade Tutty R. Rosa, Dra, M.MPd.

Relevansi Indeks Pembangunan Manusia Indonesia dengan Intensitas Gerakan Reformasi Birokrasi
Oleh: Yeti Rohayati, Dra, M.Si.

Akuntabilitas Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan
Oleh: Ir. Rosemarie S.N, M.M

Mastering Culture Based on Comparative Study of English Proverb Through Sundanese Proverb
Oleh: Dra. Hana Nurhasanah, M.Pd.

ISSN 0215-8256

STT No. 2009/SK/DIT.JEN.PPG/STT/1994

C 11 2

Wawasan TRIDHARMA

Majalah Ilmiah Bulanan Kopertis Wilayah IV — Informasi Komunikasi dan Pengkajian IPTEK

PELINDUNG
Koodinator Kopertiw Wilayah IV

PEMIMPIN UMUM
Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IV

PIMPINAN REDAKSI/ PENANGGUNGJAWAB
Prof. Dr. H. Tjahjo Sutisnawidjaja, MS.

PENASEHAT/KONSULTAN REDAKSI
Prof. Dr. Bambang Hidayat
Prof. Dr. Hatta, SH, MH.

PENYUNTING PELAKSANA
Prof. Dr. H. Tjahjo Sutisnawidjaja, MS
Dr. Budi Hartanto, M.Sc.
Prof. Dr. Hj. Atie Rachmiatie, M.S.
Prof. Dr. Hj. Dewi Laelatul Badriah, M.Kes.
Prof. Dr. H. Endang Komara, M.Si.
Dr. Erni Rusyani, MS.
Dr. Titin Rostini.
Dr. Sayu Putu Yuni Paryati, drh, M.Si.

PENYUNTING AKHIR
Prof. Dr. Hj. Atie Rachmiatie, M.Si.
Dr. Erni Rusyani, MS.

SEKRETARIS REDAKSI
Ade Nedi Supardi, Drs.

PENGELOLA USAHA
Kopkar Kopertis Wilayah IV
Jl. Penghulu Hasan Mustofa No. 38
Tlp. (022) 7272531 – 7275630 Bandung.

Daftar Isi

Daftar Isi 1

Kata Pengantar 2

Relevansi Indeks Pembangunan Manusia Indonesia dengan Intensitas Gerakan Reformasi Birokrasi
- Oleh: Yeti Rohayati, Dra, M.Si. 3

Mastering Culture Based on Comparative Study of English Proverb Through Sundanese Proverb
- Oleh: Dra. Hana Nurhasanah, M.Pd. 10

Pengaruh Pelapisan Plastik Polypropylene (PP) Daur Ulang terhadap Sifat Fisis dan Mekanis Papan Partikel Limbah Serbuk Penggergajian
- Oleh: Sutrisno, Ir, M.Si. 13

Policy For Bengkulu East Outer Ring Road In 'Dusun Besar' Preservation Area
- Oleh: Dr. Budi Hartanto Susilo, M.Sc. 22

Karakteristik Ilmu Matematika Dapat Mengkontruksi Kecerdasan Emosional Dan Sikap Kepribadian Manusia
- Oleh: Ade Tutty R. Rosa, Dra, M.MPd. 31

Akuntabilitas sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan
- Oleh: Ir. Rosemarie S.N, M.M. 38

Dampak Pelatihan Teknologi Silvikultur Intensif terhadap Penerapannya Pada Sistem Usahatani di Lahan Hutan Rakyat
- Oleh: Ir. Sudrajat, M.P. 49

Analisis Peningkatan Mutu Pelayanan Lembaga Pendidikan dengan Metode *Quality Function Deployment* (QFD)
- Oleh: Maman Hilman, ST. 56

CATATAN UNTUK PARA PENULIS

Wawasan TRIDHARMA diterbitkan sebagai media informasi dan komunikasi serta forum pembahasan dan pengkajian masalah berbagai disiplin ilmu, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Redaksi mengudang para ahli, dosen, sarjana, dan praktisi untuk menulis secara bebas dan kreatif. Penyajian dapat berupa tulisan ilmiah populer, hasil penelitian, atau gagasan orisinil yang segar, obyektif dan penuh tanggungjawab. Redaksi dapat menyingkat dan memperbaiki tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah isi dan maksudnya. Nasakah ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris, dengan dilengkapi abstrak bahasa Indonesia/Inggris, masing-masing tidak lebih dari 200 kata, diketik pada kertas kuarto, jarak dua spasi, disusun dengan urutan: judul tulisan, nama penulis, abstrak, isi tulisan, daftar pustaka dan dilengkapi riwayat penulis, dengan urutan: nama lengkap dengan gelar resmi yang dipakai, tempat tanggal lahir, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan/jabatan terakhir. Jika tulisan berupa hasil penelitian, isi disusun dengan urutan: pendahuluan, latar belakang yang mencakup pokok permasalahan dan tujuan penelitian, tinjauan pustaka, pendekatan atau bahan dan metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Panjang naskah kurang lebih 6000 kata. Bila penulis lebih dari seorang, cantumkan namanya secara berurutan sesuai dengan kode etik penulisan. Tabel, gambar dan grafik harus diberi judul singkat, jelas, diberi nomor urut, jelas, dan asli. Untuk naskah yang pernah dimuat dalam penerbitan lain atau pernah disampaikan dalam ceramah, seminar/diskusi harus disebutkan dalam catatan pada halaman pertama. Naskah disertai CD dan dikirim ke redaksi Majalah Wawasan TRIDHARMA, Kantor Koperasi Kopertis Wilayah IV, Jl. P.H. Hasan Musafa No. 38 Tlp (022) 7272531-7275630 Bandung. Bagi Naskah yang dimuat disediakan honorarium yang dapat diambil di Sekretariat Redaksi.

Akuntabilitas sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan

Oleh :

Rosemarie S.N.

Staf Pengajar pada Universitas Kristen Maranatha

Abstraksi

Terus meningkatnya permintaan akan akses dan kualitas pendidikan telah membuat semua institusi pendidikan diseluruh dunia berpikir keras :" Bagaimana membuat institusi mereka menjadi lebih baik." Akuntabilitas telah disetujui sebagai salah satu faktor kunci untuk mendirikan institusi yang berkualitas. Topik-topik akuntabilitas seperti : aplikasi akuntabilitas, akuntabilitas dalam pendanaan pendidikan, atau pengukuran akuntabilitas, merupakan topik yang tetap menarik untuk dibahas. Tidaklah mudah untuk melakukan akuntabilitas secara baik pada suatu institusi pendidikan. Seluruh tokoh kunci yang terkait seperti para orangtua, guru, siswa, stakeholder, dll. Perlu bekerja bersama-sama untuk mewujudkan praktek akuntabilitas, setidaknya untuk bagian mereka sendiri. Jika satu saja dari mereka ada yang absen, akan mempempengaruhi proses akuntabilitas di seluruh bagian institusi. Akuntabilitas dapat dikategorikan menjadi tiga aspek : transparansi, respons, dan kepatuhan. Berbagai kinerja tiap individu atau kelompok paling tidak memuat satu aspek. Aplikasi akuntabilitas secara maksimal oleh seluruh tokoh kunci institusi pendidikan akan memperbesar kemungkinan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, dan pada akhirnya akan mempengaruhi daya saing negara di tingkat internasional
Kata kunci : Akuntabilitas, kualitas, pendidikan, daya saing, globalisasi.

Abstract

The continuous escalating of demand for access and quality of education has make all educational institutions around the world think hard: "How to make their institutions better." Accountability was approved as one of the key factors to construct a qualified institution. Even though accountability was not a new idea, topics about accountability such as: accountability applications, accountability on educational funding, or accountability assessment, remain interesting to discuss. It's not an easy work to conduct accountability properly in an educational institution. All the key players related to the institution such as parents, teachers, students, stakeholders, etc, need to work together to conduct practices of accountability, at least accountability practice at their own part. If one of them is absent, it could affect accountability process for the whole institution. Accountability can be categorized in three aspects: transparency, response, and compliant. Each individuals and, or groups accountability's performances contain at least one aspect. Maximum Accountability application by all educational institution's key players will create a strong, qualified institution that is adaptive to change. A qualified educational institution has big chances to produce qualified graduates, and it will affect the nation's competitiveness in international scale.
Keywords: Accountability, quality, education, competitiveness, globalization.

I. PENDAHULUAN.

Menurut Thomas Robert Malthus dalam Essay on The Principle of Population (1798), dikatakan bahwa penduduk bertambah menurut deret ukur dan bahan makanan bertambah menurut deret hitung. Dengan demikian pertumbuhan penduduk lebih cepat daripada produksi makanan yang dibutuhkan.

Akibat dari hal ini "nilai" dari manusia dipertanyakan. Dari waktu ke waktu tingkat kesulitan kehidupanpun semakin tinggi. Masalah perbandingan jumlah manusia dan kebutuhan hidup yang tidak seimbang membuat tingkat persaingan semakin meningkat. Tuntutan dari dunia bisnis dan industri yang semakin meninggi membuat manusia harus terus meningkatkan "nilai" dirinya. Salah satu cara paling umum manusia dalam meningkatkan daya saingnya adalah dengan belajar. Inilah sebabnya dunia pendidikan menjadi sangat penting dan

berhubungan erat dengan tingkat kesejahteraan umat manusia itu sendiri.

Di era sekarang ini, kemajuan teknologi telah membuat jarak antar negara menjadi semakin kecil. Hal ini membawa banyak hal positif seperti perdamaian dan kerjasama antar negara di berbagai bidang, dan berbagai hal lainnya. Selain membawa banyak hal positif, kemajuan teknologi sekarang ini juga membuat persaingan antar manusia semakin meluas sampai ke tingkat internasional. Hal ini lebih dikenal dengan nama persaingan global.

Proses globalisasi yang terjadi membuat dunia pendidikan nasionalpun harus siap untuk bersaing dengan negara-negara lainnya di dunia. Ada banyak faktor yang diduga bermanfaat / berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan pendidikan, salah satunya adalah tentang masalah akuntabilitas.

Makalah ini ditulis untuk membahas mengenai berbagai elemen tentang akuntabilitas dalam dunia pendidikan, mengenai dampak yang ditimbulkan, aplikasinya secara nyata, juga berbagai kesulitan yang dihadapi dalam penerapannya, serta berbagai hal terkait lainnya.

Hasil yang diperoleh diharapkan dapat berguna untuk membuat berbagai institusi pendidikan yang ada di Indonesia semakin maju dan dapat bersaing di dunia internasional.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Globalisasi

Selama berabad-abad, berbagai kelompok manusia di seluruh penjuru dunia telah secara aktif mendirikan berbagai hubungan dekat. Baru-baru ini proses penyatuan global telah meningkat pesat. Berbagai perusahaan multinasional memproduksi produknya di banyak negara dan kemudian menjual produk tersebut kepada para konsumen mereka di seluruh penjuru dunia. Pergerakan uang, teknologi dan bahan-bahan mentah makin lancar, menerobos batasan-batasan nasional. Sejalan dengan pergerakan berbagai produk dan keuangan tersebut, sirkulasi berbagai ide dan budaya menjadi lebih bebas. Sebagai dampaknya berbagai bentuk hukum, ekonomi, dan pergerakan sosial terbentuk pada tingkat internasional.

2.1.1. Pengertian globalisasi.

Kata "globalisasi" diambil dari kata *global*, yang artinya adalah *universal*. Globalisasi adalah suatu proses yang menyebabkan semua bangsa dan negara di dunia menjadi saling tergantung satu sama lain, saling terikat melalui perdagangan, perjalanan antar negara, masuknya budaya tertentu, dan bentuk-bentuk hubungan yang lain dan membentuk suatu bentuk masyarakat yang baru yang melampaui batas-batas geografis, budaya, dll.

Terlepas dari berbagai cara masyarakat mengartikan suatu proses globalisasi, tidak dapat dipungkiri bahwa proses globalisasi adalah sesuatu yang tak terhindarkan, sehingga persiapan dalam menyongsong proses globalisasi ini adalah suatu hal yang sangat penting.

2.1.2. Standar atau syarat dari sebuah institusi/organisasi untuk dapat dikatakan “global”

Menurut Globalstrat sebuah institusi/organisasi dapat dikatakan global jika karakteristik-karakteristik sebuah institusi/organisasi adalah :

1) Institusi/organisasi tersebut memiliki keberadaan yang berarti/berguna pada setiap bagian utama di dunia. (misalnya di setiap benua).
2) Institusi/organisasi tersebut dipandang oleh para konsumennya sebagai juara nasional atau suatu institusi/organisasi lokal dibanding sebagai institusi/organisasi asing. Adalah sangat penting bagi organisasi tersebut untuk memiliki relevansi lokal/regional dengan konsumennya. (Contoh perusahaan Nestle, dianggap sebagai produk lokal, padahal merupakan bagian portofolio perusahaan makanan raksasa dari Swiss ini)
3) Institusi/organisasi tersebut mempertahankan nilai-nilai inti universal dan beberapa bagian pengetahuan yang secara cermat telah dimodifikasi seperlunya agar relevan dan sesuai dengan kepentingan persyaratan regional/nasional.
4) Institusi/organisasi tersebut tidak mendapatkan 50% dari pendapatan kotornya dari satu negara saja atau satu pasar saja.
5) Struktur pemerintahan/manajemennya merefleksikan jejak langkah global dari institusi/organisasi tersebut.
6) Kepemimpinan yang ada berpikir terus-menerus/konstan dalam hal bagaimana keputusan-keputusan yang diambil dapat berdampak pada keseluruhan keanggotaan tanpa memandang di lokasi mana mereka berada, dan mengantisipasi kebutuhan untuk menghormati tingkat kekompleksan menjadi sebuah organisasi global.
7) Berbagai sistem komunikasi dan prakteknya digunakan untuk mendukung kolaborasi global (termasuk format telepon, waktu, dll). Komunikasi yang ada harus jelas dan tidak sulit.
8) Para pemimpin dan para staff harus mau bepergian. Pelaku globalisasi bukanlah seorang komentator acara olahraga. Pengalaman untuk mengalami sendiri apa yang dimakan masyarakat

disuatu daerah, mengalami kondisi tidak mengerti bahasa lokal, dll.

Lebih lanjut dalam Global Leadership, 2003 ada 5 ciri seorang pemimpin dapat dikatakan sebagai pemimpin global :

1) Berpikir secara global (*thinking globally*)
   Para pemimpin global perlu memiliki sudut pandang global dan mengerti berbagai keuntungan yang dapat diperoleh pada tingkat global. Pemimpin global di masa depan juga akan membantu mendidik para pekerja dan mempersiapkan mereka untuk melakukan bisnis/kegiatan pada berbagai kebudayaan yang berbeda.
2) Menghargai berbagai perbedaan kebudayaan (*appreciating cultural diversity*)
   Kekayaan perbedaan kebudayaan dan perbedaan cara berpikir di seluruh dunia merupakan salah satu sumber daya terhebat manusia. Pemimpin global di masa depan akan menggunakan berbagai ide, metode, dan motivasi yang bervariasi kepada seluruh tenaga kerjanya dan di di seluruh bumi untuk membangun kompetensi individu dan organisasi.
3) Mengembangkan pengetahuan, kemampuan teknologi (*developing technological savvy*).
   Pemimpin harus memiliki pengertian bahwa jika teknologi digunakan secara pantas, akan membawa keuntungan bagi organisasi mereka, dan bahwa mereka harus memiliki sistem untuk membangun dan mempertahankan sebuah jaringan kerja dari sekumpulan individu yang memiliki kompetensi teknik.
4) Membangun berbagai kerjasama dan persekutuan (*building partnerships and alliances*)
   Suatu jenis kepemimpinan yang baru yang bergantung pada berbagai bentuk kerjasama dan persuasi melalui kekuatan dan nilai berbagai ide/pemikiran. Pemimpin global akan menggunakan kemampuan mempengaruhi dibanding dengan harus memerintah dan mengontrol manajemen sebagai gaya operasi mereka.
5) Membagi kepemimpinan. (*sharing leadership*)
   Pemimpin global masa depan harus memiliki kemampuan untuk mengelola perusahaan dengan cara yang multi dimensi. Pemimpin akan membutuhkan keahlian khusus dan banyak kredibilitas dalam rangka mengelola berbagai perusahaan/organisasi dengan cara ini, karena akan sangat tidak jelas mengenai "siapa memimpin siapa"

2.1.3. Bagaimana globalisasi mempengaruhi tuntutan masyarakat terhadap kinerja institusi pendidikan ? Apa implikasi kecenderungan ini pada pendidikan?

Mengapa globalisasi meningkatkan permintaan akan pendidikan dan akan kualitas pendidikan ? Jawabannya terletak pada dua bagian.

Pertama, meningkatnya hasil/tingkat upah berbagai pekerjaan yang bersifat global, berbasis pengetahuan (*science based*), ekonomi dengan intensif pengetahuan.

Kedua, sosial politik : secara demografis dan ideologi demokrasi akan adanya kesetaraan meningkatnya tekanan pada universitas untuk menyediakan berbagai akses mendapatkan pendidikan tinggi bagi berbagai kelompok yang biasanya tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan tinggi.

Kedua hal diatas menunjukkan adanya minat yang besar dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan yang dapat membuat tingkat kesejahteraan mereka meningkat. Perencanaan, program-program, dan kinerja institusi pendidikan tentunya diminta mengarah kepada peningkatan kualitas. Selain itu tuntutan akan kesetaraan juga terus berlangsung yang dapat diartikan tuntutan agar biaya dapat terjangkau oleh semua golongan masyarakat, dan pendidikan tersebar merata ke seluruh tanah air.

Implikasi dari hal ini tentunya membuat berbagai pendidikan harus berpikir keras untuk di satu sisi meningkatkan kualitasnya, dan di sisi lain tetap mengadopsi faktor kesetaraan.

Kedua hal ini terkadang dapat bertentangan, terutama jika menyinggung soal biaya pendidikan. Dana pendidikan yang tinggi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas tetapi di satu sisi akan membebani siswa terutama dari kalangan tidak mampu. Walaupun begitu keduanya perlu untuk dijalankan secara bersamaan, mengingat pemerataan sendiri merupakan bagian dari kualitas secara menyeluruh, dan adalah penting akan ketersediaan berbagai instrumen kebijakan untuk hal ini. Indonesia sebagai negara yang dahulu bersistem pemerintahan yang terpusat pun telah mulai memberlakukan sistem otonomi yang diharapkan akan membantu dalam proses pemerataan pendidikan.

2.2. Daya Saing

Globalisasi tidak dapat dihindarkan, dan pasti akan dialami oleh semua negara. Globalisasi dapat mendatangkan keuntungan ataupun kerugian, tergantung dari bagaimana negara yang bersangkutan menyikapinya dan langkah-langkah apa yang diambil dalam mempersiapkan diri menghadapi persaingan globalisasi. Di sini daya saing suatu negara menjadi

sangat penting untuk memanfaatkan globalisasi sebaik-baiknya. Negara-negara yang memiliki daya saing yang tinggi tentu akan diuntungkan oleh globalisasi baik dalam bidang ekonomi, budaya, dll, sedangkan negara-negara yang kalah bersaing akan mendapatkan tingkat kesulitan yang lebih tinggi di berbagai bidang kehidupannya.

2.2.1. Daya saing Indonesia.

Negara Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia tidak lepas dari proses globalisasi ini. Di masa lampau Indonesia pernah beberapa kali mencoba untuk mengundur datangnya proses globalisasi kedalam masyarakatnya. Kita mau atau tidak mau harus siap menghadapi proses globalisasi yang tidak terelakkan ini. Lalu bagaimanakah tingkat daya saing Indonesia saat ini ?, mengingat daya saing besar peranannya dalam menentukan dapat tidaknya suatu negara memanfaatkan proses globalisasi untuk mendatangkan manfaat bagi masyarakatnya.

Rendahnya investasi pengembangan sumberdaya manusia dan pengetahuan di Indonesia berkorelasi secara positif terhadap peringkat daya saing Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain dan peringkat perguruan tinggi Indonesia dibandingkan dengan berbagai perguruan tinggi di dunia dan Asia.

2.2.2. Daya saing institusi-institusi pendidikan yang ada di Indonesia.

Pendidikan yang memiliki peran utama dalam menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang handal tentunya harus terus meningkatkan kualitasnya agar lulusan yang dihasilkan memiliki daya saing yang tinggi. Hal ini berarti institusi-institusi pendidikan tinggi juga harus memiliki daya saing tinggi terhadap institusi-institusi pendidikan lainnya baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dengan melihat standar / syarat suatu organisasi/ institusi dapat dikatakan global maka kita dapat memperkirakan bahwa sangat sedikit sekali atau bahkan tidak ada institusi pendidikan di negara kita yang memenuhi syarat/standar tersebut.

2.2.3. Meningkatkan kualitas institusi-institusi pendidikan di Indonesia.

Permasalahan rendahnya daya saing institusi-institusi pendidikan di Indonesia tentunya perlu segera diatasi, terutama jika kita tidak mau terus menerus berada di bawah negara lain dalam hal kemampuan memanfaatkan proses globalisasi yang terjadi, dan juga mengingat bahwa negara-negara lain sampai saat ini pun belum berhenti untuk berlomba-lomba meningkatkan kualitas pendidikannya. Paradigma baru untuk pengelolaan Perguruan Tinggi dapat dijadikan acuan untuk peningkatan kualitas sehingga dapat meningkatkan daya saing institusi-institusi pendidikan di Indonesia.

Dari gambar diatas, akuntabilitas merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui oleh setiap institusi pendidikan. Akuntabilitas dapat memberikan kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan tanggung jawab dan memberikan kewenangan. Institusi Pendidikan harus akuntabel terhadap stakeholders

2.3. Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas sebenarnya sudah dikenal sejak dahulu kala. Namun skala penggunaanya di kala itu masih tidak sesering sekarang. Hanya ada beberapa pemimpin yang mungkin dianggap "bijaksana" yang mempergunakan akuntabilitas. Di masa sekarang dimana ada perubahan bentuk-bentuk negara menjadi republik, demokrat, ataupun tetap menggunakan sistem kerajaan yang sudah dimodifikasi (dimana kekuasaan seorang raja tidak lagi seluas dahulu – lebih sering hanya sebagai simbol dan urusan persahabatan) maka permintaan dan penggunaan akuntabilitas menjadi semakin meningkat. Hal ini karena pemimpin (presiden, perdana menteri, dll) dipilih dan mengemban tugas dari rakyat. Hal ini meluas sampai ke tingkat berbagai organisasi/institusi pemerintah dan swasta bahkan sampai ke tingkat individu yang terkecil.

2.3.1. Pengertian Akuntabilitas.

Secara singkat adalah tanggung jawab kepada seseorang atau untuk suatu kegiatan. Secara harafiah, konsep akuntabilitas atau *"accountabillity"* berasal dari dua kata, yaitu "*account"* (rekening, catatan, laporan) dan *"ability"* "kemampuan". Akuntabilitas bisa diartikan sebagai kemampuan menunjukkan laporan atau catatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penjelasan rinci mengenai pengertian akuntabilitas masih sangat jarang ada di berbagai literatur. Menurut Heim,1995 penjelasan akuntabilitas adalah :

- Laporan (to explain).
  Memberikan penjelasan mengenai tindakan/kegiatan yang dilakukan.
- Memberikan alasan pembenaran (to justify)
  Mengemukakan alasan-alasan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan sudah sesuai standar, atau alasan-alasan kondisi atau keterbatasan realistis yang mungkin menjadi faktor penyebab jika suatu tindakan tidak/kurang berhasil.
- Bertanggungjawab pada berbagai konsekuensi yang timbul (responsibility for the consequences of actions taken).

CSR Network (lembaga yang sering mengadakan pengukuran akuntabilitas) mendefinisikan akuntabilitas sebagai :

" Kemampuan sebuah organisasi/perusahaan untuk menjelaskan dan memberikan alasan pembenaran mengenai berbagai tindakan yang telah mereka lakukan, dan untuk mengambil tanggungjawab/bertanggungjawab akan berbagai konsekuensi yang timbul dari tindakan-tindakan tersebut."

2.3.2. Jenis Akuntabilitas

Bruce Stone, O.P Dwivedi, dan Joseph G. Jabbra menyoroti beberapa tipe dari akuntabilitas :

1) Akuntabilitas Moral.
   Berkaitan dengan tanggung jawab moral seseorang secara pribadi. Akuntabilitas ini sulit untuk diukur karena berkaitan dengan apa yang diyakini pribadi tersebut yang bisa berbeda satu dengan yang lainnya.
2) Akuntabilitas Politik.
   Akuntabilitas politik adalah akuntabilitas dari pihak pemerintah, pelayan masyarakat, dan para politikus kepada masyarakat umum dan kepada berbagai badan legslatif seperti kongres atau parlemen (di Indonesia seperti MPR dan DPR).
3) Akuntabilitas Administratif.
   Menjaga para pelayan masyarakat yang bekerja dalam bidang administrasi pemerintahan untuk tetap dapat dikatakan akuntabel. Perlu ada berbagai mekanisme untuk melakukan hal ini, yaitu dengan dibuatnya berbagai peraturan dan norma internal dan juga dibentuknya berbagai komisi independen.
4) Akuntabilitas Pasar.
   Banyaknya tuntutan akan desentralisasi dan privatisasi kepada pihak pemerintah, menyebabkan berbagai bentuk pelayanan yang tersedia di hari-hari ini menjadi lebih terfokus kepada kebutuhan konsumen *("customer-driven")* dan harus tertuju untuk menyediakan kenyamanan dan berbagai pilihan kepada warga negara.
5) Akuntabilitas dalam berbagai hubungan konstituen.
   Dalam pandangan ini, organisasi tertentu atau pihak pemerintahan dapat dikatakan akuntabel jika suara dari berbagai kelompok dan institusi yang ada diluar sektor publik yang mewakili berbagai minat warga negara dalam bidang konstituensi telah terdengar.
6) Akuntabilitas Manajerial.
   Akuntabilitas manajerial terpusat pada manajerial suatu organisasi, efisiensi dan efektivitas penggunaan harta perusahaan yang berupa dana, sumber daya manusia, berbagai peralatan, dll. Akuntabilitas ini juga melihat pada kinerja manajer atau pengawas dalam menangani masalah yang ada, menetapkan suatu proses yang berkelanjutan seperti perencaaan dan penganggaran, sehingga memungkinkan mereka memberikan pelayan publik yang terbaik.
7) Akuntabilitas Professional.
   Akuntabilitas professional diperuntukkan bagi kaum professional dengan cara menetapkan suatu standar profesi dan berbagai kode etik. Dalam melaksanakan kegiatannya tetap dalam jalur norma-norma dan standar profesi tersebut. Jika mereka mentaati semua standar profesi tersebut maka mereka dapat dikatakan akuntabel.
8) Akuntabilitas Legal/ Yudisial.
   Berkaitan dengan aspek hukum, dimana pelaksanaan hukum disesuaikan dengan produk dan jasa hukum yang memang diminta oleh masyarakat / sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.3.3. Latar belakang permintaan akan akuntabilitas.

Seperti dijelaskan diatas di era globalisasi ini ada peningkatan tuntutan dari masyarakat akan peningkatan kualitas dan kinerja institusi-institusi pendidikan. Ada berbagai penyebab dari hal ini salah satunya adalah melambungnya biaya pendidikan.

Menurut Harvey, 2002 :

Alasan dilakukannya akuntabilitas meliputi biaya dan berbagai masalah potensial yang timbul dari "*massification"* (Proses peningkatan jumlah secara besar-besaran).

- Adanya keinginan dan kebutuhan untuk mencatat, memperhitungkan, dan menangani, meningkatnya jumlah uang masyarakat.
- Kebutuhan untuk memastikan "nilai" dari uang pemerintah dan masyarakat.
- Kurangnya batas-batas kejelasan akuntabilitas yang ada dalam berbagai sistem pendidikan tinggi.
- Globalisasi dan kebutuhan untuk tetap menjaga kontrol yang merupakan akibat dari meningkatnya jumlah/luas pasar bebas.

Sedangkan menurut NCAHE, 2004 :

Kegunaan utama dari berbagai sistem akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kinerja, untuk menjamin kualitas, dan untuk mempertahankan rasa kepercayaan diri.

Ada pertanyaan tentang apakah pengeluaran universitas telah dipergunakan secara efektif untuk menolong siswa. Tingkat kelulusan siswa dan tingkat ketepatan waktu lulus siswa dapat dijadikan acuan efektif tidaknya kinerja universitas untuk membantu para siswa. Walaupun berbagai prospek keuntungan masa depan bagi siswa yang menyelesaikan

pendidikan dapat dijadikan alasan pembenaran dari beban biaya yang ditanggung seseorang, tapi tingginya rata-rata siswa yang tidak mampu menyelesaikan pendidikan atau yang tertunda penyelesaiannya menimbulkan pertanyaan apakah universitas-universitas yang ada telah bekerja sungguh-sungguh untuk memaksimalkan tingkat kesuksesan siswa. Pertanyaan mengenai apakah pengeluaran universitas telah didedikasikan untuk pemenuhan kebutuhan siswa memang beralasan, mengingat proporsi pengeluaran institusi pada pelayanan pendidikan telah diabaikan selama ini sedangkan pengeluaran pada kegiatan non-instruksional seperti, berbagai pelayanan administrasi justru telah mengalami peningkatan.

2.3.4. Kegunaan / fungsi akuntabilitas.

Ada 5 Fungsi akuntabilitas menurut Harvey, 2002 :

1) Akuntabilitas berfungsi untuk memberikan jaminan melalui evaluasi eksternal, bahwa institusi atau program dapat dinilai akuntabel bagi para stakeholder seperti pemerintah (atas nama pembayar pajak), kaum profesi, para pekerja, dan siswa.
2) Akuntabilitas berfungsi untuk memastikan bahwa berbagai prinsip dan praktek yang ada dalam pendidikan tinggi tidak tererosi atau habis oleh waktu atau mungkin ketinggalan jaman.
3) Akuntabilitas kepada pihak siswa bahwa program yang ada telah diorganisir dan dijalankan seperti yang diminta.
4) Fungsi akuntabilitas dari evaluasi kualitas berbagai prosedur adalah mengenai cakupan informasi publik yaitu tentang kualitas dari berbagai institusi dan program. Hal ini dapat berguna sebagai informasi bagi:
   - Para pemberi dana, yang mana dapat digunakan, misalnya, untuk membantu dalam berbagai keputusan alokasi pendanaan.
   - Para pengguna (seperti siswa prospektif dan para perekrut lulusan), dimana informasi ini memang seharusnya membantu untuk menginformasikan mengenai pilihan yang ada.
5) Akuntabilitas berfungsi untuk mempergunakan evaluasi akan kualitas sebagai kendaraan untuk menerima suatu bentuk pemenuhan/ketaatan. Evaluasi akan mendorong munculnya pemenuhan/ketaatan pada kebijakan pemerintah atau pada kebijakan tertentu dari pihak stakeholders seperti persatuan kaum profesional dan persatuan para pemberi kerja. Pihak pemerintah biasanya adalah yang paling kuat dalam hal ini dan paling memiliki kepentingan akan hal ini pada pendidikan tinggi karena pemerintah menjadi penyedia begitu banyak uang dan pada banyak kasus mereka berkuasa mengontrol proses lisensi dari berbagai institusi.

III. PEMBAHASAN

3.1. Pengukuran akuntabilitas.

Menurut CSR Network dan international think-thank accountability (lembaga yang sering melakukan pengukuran akuntabilitas) pengukuran akuntabilitas adalah sebuah media untuk mengukur sampai sejauh mana "niat" berbagai organisasi/perusahaan yang telah membangun berbagai praktek tanggungjawab dalam melakukan kegiatan bisnisnya, dan dampak dari hal ini pada ekonomi, masyarakat, dan lingkungan tempat mereka beroperasi. Lebih jauh mereka mengevaluasi berbagai organisasi/perusahaan pada 4 area kunci yang akan befungsi untuk menjawab berbagai pertanyaan akan akuntabilitas.

4 area kunci pengukuran akuntabilitas tersebut adalah :

- Maksud/tujuan dari strategi yang dibuat (strategic intent)
  Melihat kepada strategi utama yang dibuat organisasi/perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Apakah telah mencatat, menyinggung berbagai isu penting di sektor sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara luas ?
- Tata pamong dan pengelolaan (governance and management)
  Apakah para eksekutif senior dan anggota dewan pemimpin di organisasi/perusahaan memiliki akuntabilitas kepada para stakeholder ketika sedang membuat strategi dan memformulasikan kebijakan di area isu-isu pembiayaan tambahan ? Apakah kemudian hal ini dijabarkan, diaplikasikan pada berbagai sistem manajemen, prosedur standar, insentif, dan kinerja pencapaian sasaran yang berguna untuk mencapai berbagai tujuan secara spesifik?
- Kegiatan pelaksanaan strategi yang telah dibuat (engagement)
  Apakah organisasi/perusahaan sudah melakukan berbagai dialog dengan berbagai individu dan kelompok yang tertarik pada kegiatan organisasi/perusahaan, yang mungkin akan terkena dampak atau memberi dampak pada kegiatan organisasi/perusahaan ? Apakah publisitas organisasi/perusahaan kepada umum sudah melaporkan kinerja sosial dan lingkungan hidupnya ? Dan apakah sudah menyebutkan

tentang jaminan kredibilitas independen organisasi/perusahaan ?

- Kinerja operasional (operational performance)
  Sudah seberapa efektif organisasi/perusahaan dalam mengimplementasi berbagai strateginya, berbagai sistem manajemennya, dan berbagai mekanisme kegiatannya sebagaiman terindikasi oleh kinerja organisasi/ perusahaan dalam berbagai variasi dampak/akibat yang ditimbulkan di sektor sosial dan lingkungan hidup.

Lebih jauh menurut metode AA 1000, ada 3 aspek suatu organisasi/institusi dapat dikatakan akuntabel :

1) **Aspek transparansi (transparent)**
   Organisasi/institusi terbuka dan jujur mengenai semua tindakan/kegiatannya, mengenai alasan-alasan dibalik tindakan yang dilakukan dan mengenai dampak tindakan tersebut pada masyarakat dan lingkungannya.
2) **Aspek respon (responsive)**
   Tingkat respon organisasi/institusi pada berbagai hal yang menjadi perhatian/keinginan dari para stakeholder yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, atau dapat dipengaruhi oleh bisnis/kegiatan organisasi/institusi.
3) **Aspek kepatuhan (compliant)**
   Kegiatan organisasi/institusi sesuai atau relevan dengan berbagai standar dan peraturan yang dimandatkan.

   Berbagai keterbatasan yang mungkin muncul ketika menilai/mengukur akuntabilitas suatu organisasi/institusi :

   - Masalah kebiasaan
     Penilaian/pengukuran akuntabilitas biasanya dilakukan dengan menggunakan data organisasi/institusi yang dilaporkan kepada publik. Data ini disediakan oleh pihak organisasi/institusi. Beberapa organisasi/institusi belum/tidak terbiasa dengan proses keterbukaan pada publik, karena itu organisasi/institusi tersebut mungkin belum/tidak melaporkan semua praktek kegiatannya yang dapat berguna untuk pengukuran akuntabilitas.
   - Masalah kegiatan yang sengaja tidak dilaporkan.
     Beberapa organisasi/institusi mungkin tidak dapat membuka beberapa informasi mengenai kegiatan mereka yang relevan dengan pengukuran akuntabilitas. Hal ini bisa disebabkan oleh karena alasan-alasan hukum atau berbagai alasan lainnya.
   - Masalah waktu pembuatan laporan.
     Pada masa senggang yang terjadi berkaitan dengan persiapan laporan tahunan oleh organisasi/institusi banyak hal dapat terjadi. Data kinerja organisasi/institusi yang didapat dapat berbeda dengan kinerja organisasi/institusi yang terbaru.
   - Masalah media.
     Dalam menilai akuntabilitas suatu organisasi/institusi terutama pada bagian kinerja operasional, sebagian dari pengukuran/assessment didasarkan dari liputan media. Media mungkin saja gagal dalam meliput hal ini atau terlau berlebihan dalam meliput terutama pada isu-isu kontroversial yang berhubungan dengan beberapa organisasi/institusi.

3.2. Akuntabilitas dan hubungannya dalam usaha meningkatkan pendidikan.

3.2.1. Akuntabilitas dan peningkatan pendidikan.

Hubungan akuntabilitas dan peningkatan pendidikan menjadi topik yang selalu menarik pada banyak negara di berbagai belahan dunia. Menurut Eric A. Hanushek dan Margaret E. Raymond : Perubahan yang terjadi pada pendidikan yang menjauh dari "fokus akan input dan proses" dan mendekat kepada "fokus akan hasil" menandai adanya pergeseran cara pandang pendidikan. Walaupun begitu hanya sedikit yang mengetahui bagaimana sistem ini akan bekerja, terdapat "kurangnya bukti akuntabilitas" pada masalah ini.

Pada era globalisasi ini banyak institusi pendidikan tinggi di Indonesia yang mulai mengadopsi berbagai kebijakan akuntabilitas untuk mengukur kinerja institusi mereka. Berbagai institusi pendidikan mulai mengukur hasil akhir pendidikan pada siswa mereka dan menggunakannya sebagai faktor pengukur tingkat efektivitas institusi mereka.

3.2.2. Akuntabilitas pemimpin institusi pendidikan.

Berkaitan dengan para eksekutif senior, dan anggota dewan pemimpin di suatu institusi pendidikan :

- Memiliki hubungan yang baik dengan para stakeholder dan bertanggungjawab kepada mereka. Selama ini pada banyak institusi di Indonesia, tanggungjawab para pemimpin hanya mengarah ke atas ke pihak dinas pendidikan atau pemerintahan.
- Salah satu tugas utama pemimpin suatu institusi pendidikan adalah membuat strategi dan kebijakan yang menentukan arah dan proses kegiatan institusi tersebut. Jika para pemimpin institusi tersebut benar-benar mempunyai akuntabilitas maka akan tercermin dari berbagai strategi dan kebijakan institusi yang dibuatnya.
- Memastikan bahwa kebijakan yang telah dibuat

dapat tersalurkan pada setiap sistem yang ada di pendidikan tinggi tersebut mulai dari sistem manajemen, prosedur standar, insentif, kinerja pencapaian sasaran, dll.

- Tugas akuntabilitas lain dari pemimpin institusi pendidikan tinggi adalah mengawasi bawahan yang menjadi bagiannya, menerima laporan dari mereka terkait pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat, dan bahkan memastikan sistem pengawasan, pelaporan berjalan dengan baik

Tanggung jawab pimpinan organisasi/institusi ke pihak yang lebih tinggi seperti pemerintah dapat digolongkan terutama sebagai aspek kepatuhan dan memuat juga aspek transparansi, sedangkan tanggung jawab hubungan pada stakeholder lainnya seperti masyarakat digolongkan sebagai aspek respon dan aspek transparansi.

Pembuatan strategi dan kebijakan yang mencerminkan keinginan, perhatian stakeholder termasuk aspek respon.

Bagian menyalurkan strategi/kebijakan ke setiap bagian terkait dan pengawasan kepada bawahan dan sistem pelaporan, sistem kerja lebih dapat diartikan sebagai usaha untuk mendukung terwujudnya ketiga aspek (transparansi, respon, dan kepatuhan)

3.2.3. Akuntabilitas para pekerja institusi pendidikan

Berkaitan dengan semua pekerja yang bekerja pada suatu institusi pendidikan mulai dari tingkat terendah sampai tinggi (contoh: pegawai bagian administrasi, sekretariat, keamanan, dll).

- Memiliki tanggung jawab kepada atasan mereka masing-masing sesuai struktur organisasi yang berlaku di institusi, yang pada akhirnya sampai kepada para pemimpin institusi pendidikan. Hal ini merupakan suatu bentuk akuntabilitas dan biasanya sering didapati karena para atasan memiliki wewenang khusus kepada para pekerja.
- Memiliki tanggung jawab kepada pihak stakeholder baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Berkaitan dengan kinerja dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh para pekerja institusi pendidikan.
- Melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar dan metode-metode yang sudah dimandatkan oleh institusi. Mematuhi peraturan yang ada dan etika profesi yang ditetapkan.
- Memiliki tanggung jawab kepada sesama rekan pekerja. Para pekerja dapat saling mengingatkan akan pencapaian kinerja rekannya bahkan kalau perlu membantu rekannya walaupun prioritas tetap harus ada pada pekerjaan masing-masing.
- Memiliki tanggung jawab dalam mengawasi bawahan yang mereka miliki, mengawasi laporan-laporan yang ada dan semua aktivitas yang berada di ruang lingkup mereka.

Tanggung jawab terhadap atasan dan terhadap standar, metode-metode yang dimandatkan institusi dapat digolongkan terutama sebagai aspek kepatuhan dan ada aspek transparansi.

Tanggung jawab kepada pihak stakeholder termasuk aspek respon, dan aspek transparansi. Tanggung jawab kepada rekan kerja, bawahan dan juga mengenai sistem pelaporan, assessment/pengukuran kinerja dan pemberian insentif dapat diartikan sebagai hal-hal yang mendukung tercapainya akuntabilitas di ketiga aspek (transparansi, respon, kepatuhan).

3.2.4. Akuntabilitas tenaga pendidik institusi pendidikan.

Berkaitan dengan tenaga pendidik seperti guru, dosen, mentor, dll di suatu institusi pendidikan termasuk para pekerja yang juga melakukan kegiatan mengajar.

- Tanggungjawab kepada atasan mereka baik kepala sekolah, dekan, dll. Melakukan sesuai dengan yang diperintahkan dan juga sesuai dengan standar, metode yang ditetapkan oleh institusi. Lebih jauh baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada ikatan profesi dan dinas pendidikan yang sah.
- Tanggung jawab kepada para stakeholder seperti masyarakat, orangtua murid, dll. Memperhatikan hal-hal yang diinginkan oleh para stakeholder dalam hubungannya dengan dunia pendidikan.
- Secara khusus tanggungjawab kepada siswa yang dididik bagaimana hasil pencapaian belajar mereka. Bertanggungjawab agar siswa yang dididik dapat memperoleh hasil belajar yang baik dan kemajuan keahlian dan memperoleh tujuan yang diinginkan.
- Tanggungjawab kepada sesama rekan tenaga pendidik, mengingatkan akan pencapaian kinerja mereka, dan saling membantu dalam pekerjaan tanpa meninggalkan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Tanggung jawab kepada atasan dan pada berbagai peraturan, standar, serta metode yang dimandatkan dapat digolongkan terutama sebagai aspek kepatuhan. Tanggung jawab kepada pihak stakeholder dan kepada siswa dapat digolongkan sebagai aspek respon, dan transparansi. Sedangkan tanggungjawab kepada sesama rekan tenaga pendidik dapat diartikan sebagai hal-hal yang mendukung tercapainya berbagai aspek akuntabilitas dalam suatu institusi.

3.2.5. Akuntabilitas siswa institusi pendidikan.

Berkaitan dengan siswa/mahasiswa pada berbagai institusi pendidikan tinggi.

- Tanggungjawab kepada atasan dalam hal ini

kepada guru yang megajar, kepada orangtua masing-masing. Mematuhi setiap peraturan yang ada di sekolah/universitas merupakan suatu bentuk akuntabilitas siswa.

- Tanggungjawab kepada proses belajar dan hasil belajar yang dicapainya. Disini diharapkan siswa dapat bekerja-sama dengan para guru/dosen dalam hal cara belajar dan pencapaian pendidikan
- Tanggung jawab kepada teman siswa, saling membantu dalam tercapainya hasil yang lebih baik.
- Tanggung jawab ke masyarakat. Berkaitan dengan masa depan dimana lulusan diharapkan memberikan sumbangsihnya kepada masyarakat. Banyak siswa yang mungkin belum menyadari adanya tanggungjawab ini..

Tanggungjawab kepada guru, dosen, orangtua, dan berbagai peraturan sekolah dan universitas dapat digolongkan sebagai akuntabilitas pada aspek kepatuhan. Tanggungjawab kepada hasil pencapaian, dan bekerjasama dengan guru/dosen, memiliki aspek kepatuhan, respon, dan transparansi. Sedangkan tanggung jawab kepada teman siswa lainnya dapat menjadi hal yang membantu siswa dalam pencapaian akuntabilitas ketiga aspek (transparansi, respon, kepatuhan) Tanggungjawab kepada masyarakat terutama bila disadari oleh sang siswa merupakan akuntabilitas aspek respon.

3.2.6. Akuntabilitas orangtua siswa dalam pendidikan.

Berkaitan dengan orangtua dan wali siswa.

- Orangtua bekerjasama dengan para guru/dosen bertanggung jawab mengawasi dan mendorong kegiatan belajar siswa lebih lanjut bekerja sama dengan putra/putri mereka agar mencapai hasil yang lebih baik.
- Dengan masuknya para siswa ke dalam proses belajar mengajar di institusi pendidikan yang ada sudah merupakan akuntabilitas pihak orangtua.

Masuknya para siswa kedalam kegiatan belajar-mengajar yang berlaku dimana merupakan program pemerintah dan keinginan masyarakat untuk terciptanya masyarakat Indonesia yang lebih maju, sudah dapat digolongkan sebagai akuntabilitas aspek kepatuhan kepada peraturan pemerintah, dan aspek respon pada keinginan masyarakat.

Kerjasama dengan pihak guru/dosen dan siswa dapat diartikan sebagai hal yang membantu terciptanya akuntabilitas di semua aspek. Terutama aspek respon khususnyan kepada kepentingan siswa dan guru.

3.2.7. Akuntabilitas pemerintah dalam pendidikan.

Berkaitan dengan semua institusi pemerintahan baik dari pusat sebagai pemberi keputusan berbagai kebijakan maupun berbagai bentuk dinas pendidikan yang ada.

- Akreditasi dan berbagai upaya, peraturan untuk mengawasi, mendorong tingkat kualitas pendidikan merupakan akuntabilitas pemerintah pada pendidikan.
- Tanggungjawab kepada masyarakat untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan akses pendidikan, kualitas pendidikan, dan berbagai tuntutan lainnya. Dengan diperbesarnya proporsi anggaran pada pendidikan dapat digunakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.

Secara jelas usaha pemerintah seperti akreditasi, dan berbagai peraturan untuk mengatur, mengawasi, mengkoordinasi pendidikan merupakan akuntabilitas sebagai aspek respon. Sedangkan dalam hal biaya anggaran baik perencanaannya, pelaksanaannya, pelaporannya selain sebagai aspek respon juga dapat dipandang sebagai aspek transparansi.

Jika melihat posisi pemerintah sebagai wakil rakyat, sebagai pihak yang ditunjuk oleh rakyat maka berbagai usaha pemerintah di bidang pendidikan yang mencerminkan keinginan masyarakat mungkin saja dipandang sebagai akuntabilitas pada aspek kepatuhan.

3.2.8. Akuntabilitas berbagai pihak lainnya.

Berbagai pihak lainnya seperti alumni, ikatan profesi, pemberi kerja, masyarakat umum dapat saja memberikan kontribusi dalam terciptanya akuntabilitas di berbagai institusi pendidikan di Indonesia. Selain berbagai tuntutan dari mereka yang memaksa institusi pendidikan tinggi menjadi akuntabel, mereka dapat ikut mengawasi, memberi pandangan, masukan, kepada institusi pendidikan. Mereka juga dapat ikut andil dalam menangani masalah biaya pendidikan seperti dengan mengadakan berbagai program bea-siswa, magang, dll. Institusi pendidikan dengan masyarakat, ikatan profesi, pemberi kerja dapat mengadakan suatu hubungan yang saling menguntungkan misalnya melalui penelitian, penyediaan tenaga kerja tepat guna, pelatihan-pelatihan dan berbagai bentuk lainnya.

3.2.9. Akuntabilitas dan hubungannya dengan pembiayaan pendidikan.

Secara logis usaha meningkatkan pendidikan baik dari segi kualitas, pemerataan, dll tentu memerlukan kenaikan dana/pembiayaan pendidikan. Jika dana yang tersedia terbatas maka usaha meningkatkan pendidikan juga akan terbatas. Menurut Moch. Idochi Anwar, 2003 : ketidak efisienan pengelolaan sumber-sumber biaya dan

pemanfaatannya selaku investasi dalam sistem pendidikan dapat memberikan dampak negatif terhadap jumlah dan mutu produk pendidikan. Ketidak-efisienan serta ketidak-efektifan ini, karena ketidak-tepatan dalam penggunaan dana yang dapat mencakup dalam pengelolaan biaya dari beberapa komponen utama sistem pendidikan antara lain guru, murid, kurikulum, sarana, dan prasarana pendidikan.
Melihat dari hal-hal diatas dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan akuntabilitas dalam menangani masalah dana/pembiayaan pendidikan mulai dari proses :

- Perolehan dana.
- Pengalokasian dana.
- Pengelolaan dana.

IV. SIMPULAN

Mengingat daya saing bangsa sangat penting dalam menentukan apakah suatu negara dapat memanfaatkan globalisasi untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya atau justru mendatangkan kerugian, maka perlu dilakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Akuntabilitas institusi pendidikan perlu dilakukan oleh semua pihak yang terkait mulai dari pihak pemerintah, masyarakat umum, pemimpin dan pekerja institusi pendidikan, tenaga pendidik, siswa, orang tua siswa, dll. Hal ini disebabkan oleh karena setiap pihak bisa saling memberikan umpan balik berupa pengawasan, perintah, kebijakan, tuntutan-tuntutan, masukan, kepatuhan, pelaporan, kerja-sama, bantuan biaya, dll. Jika ada satu pihak saja yang tidak ikut serta dapat mempengaruhi keseluruhan proses dilakukannya akuntabilitas. Hal ini tentunya merupakan tantangan tersendiri bagaimana menyadarkan semua pihak untuk mau berperan serta dalam dilakukannya proses akuntabilitas.

Akuntabilitas yang dijalankan secara maksimal dengan peran serta semua pihak diharapkan akan menciptakan institusi-institusi pendidikan tanah air yang kuat, stabil, adaptif terhadap perubahan, dan berkualitas tinggi, sehingga meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan nasional di tingkat internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2008 , *"Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi "*, Jakarta.

Bridget Terry Long, "*Higher Education Finance and Accountability*", longbr@gse.harvard.edu

CSR Network and international think-thank Accountability, 2008,"*Accountability rating 2008 methodology*"- "AA1000" http:// www.accountabilityrating.com. Akses 5 Desember 2009.

Hanushek, Eric A., and Margaret E. Raymond. 2003a. "*Improving Educational Quality: How Best to Evaluate Our Schools?*" In Education in the 21st Century: Meeting the Challenges of a Changing World, edited by Yolanda Kodrzycki. Boston, MA: Federal Reserve Bank of Boston, USA

Hanushek, Eric A., and Margaret E. Raymond 2003b. " Lessons about the Design of State Accountability Systems." In *NoChild Left Behind? The Politics and Practice of Accountability*, edited by Paul E. Peterson and Martin R. West. Washington, DC: Brookings, USA

Harvey, L., 2002, "*Quality assurance in higher education: some international trends*" Higher Education Conference, Oslo

Heim, M. (February 1995). "Accountability in Education." (unpublished paper submitted to the Hawai'i Department of Education in partial fulfillment of professional improvement leave requirements). Honolulu, HI: Hawai'i State Department of Education, Office of the Superintendent.

Marshall Goldsmith, Cathy L. Greenberg, Alastair Robertson, Maya Hu-Chan, 2003. " *Global Leadership : The Next Generation*" Publishing as Financial Times Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ 07458, Pearson Education.Inc, USA

Moch. Idochi Anwar, 2003. "*Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*" Penerbit Alfabeta, Bandung

Radar Cirebon Januari, 2004, Daya-Saing-Pendidikan-Masih-Rendah-karena-Terkendala-Anggaran.html Akses 5 Desember 2009.

SALEH, Sirajudin H & Aslam Iqbal, 1995, "*Accountability", Chapter I in a Book "Accountability The Endless Prophecy"* edited by Sirajudin H Saleh and Aslam Iqbal, Asian and Pacific Develompent Centre, 1995.

Stone, Bruce, "Administrative Accountability in the 'Westminister, Democracies : Toward a New Conceptual Framework." Governance, 8(4) (1995) : 505-26

Strategi Jangka Panjang Pendidikan Tinggi 2003-2010 (HELTS) "*Mewujudkan perguruan tinggi berkualitas*".. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi – 2004.

http://www.actionaid.org. diakses tanggal 5 Desember 2009.

http://www.dashboardspy.com. diakses tanggal 5 Desember 2009.

http://www.globalpolicy.org/home.html. diakses tanggal 5 Desember 2009.

http://www.globalstrat.org. diakses tanggal 5 Desember 2009.
http://www.integro-inc.com. diakses tanggal 5 Desember 2009.
http://www.sheeo.org/account/comm-home.htm, National Commission on Accountability in Higher Education (NCAHE), 2004, Overview, State Higher Education Executive Officers (SHEEO), undated accessed October 2004. diakses tanggal 5 Desember 2009.